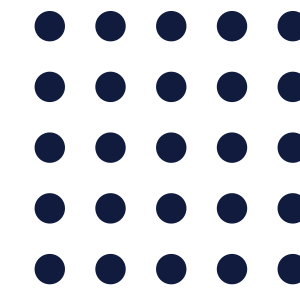
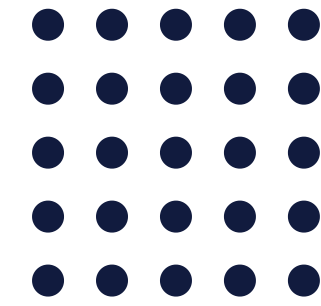


PROSES AUDIT KINERJA



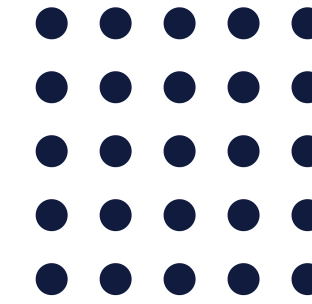
Akuntansi Sektor Publik

APA ITU AUDIT KINERJA?



- Audit kinerja merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang ditujukan untuk menilai sejauh mana suatu entitas pemerintah mampu menjalankan program, kegiatan, atau pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis.
- Menurut BPK RI (2021), audit kinerja adalah pemeriksaan yang menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) dalam pengelolaan sumber daya publik.
- Mahmudi (2020) menyatakan bahwa audit kinerja merupakan pendekatan evaluatif yang digunakan untuk menilai bagaimana instansi pemerintah bekerja dalam menghasilkan output dan outcome tertentu serta seberapa baik instansi tersebut mengelola sumber daya yang dimilikinya.

TUJUAN AUDIT KINERJA



**Menghasilkan Laporan
Pemeriksaan**



**Memperbaiki Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan**



Menilai Efektivitas Pemerintah



Menilai Efisiensi



Menilai Ekonomis



**Memperkuat Akuntabilitas
dan Transparansi**

TAHAPAN ATAU PROSES AUDIT KINERJA

1. Tahap Perencanaan Audit

Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi awal terhadap program atau kegiatan yang akan diperiksa. Auditor menganalisis risiko, menetapkan tujuan audit, dan menentukan ruang lingkup serta metodologi pemeriksaan.

2. Tahap Pelaksanaan Audit (Pemeriksaan Lapangan)

Auditor mengumpulkan bukti audit melalui wawancara, observasi langsung, telaah dokumen, pengujian pengendalian internal, dan analisis data kinerja.

3. Tahap Pelaporan Audit

Setelah bukti terkumpul dan dianalisis, auditor menyusun laporan audit yang berisi temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan.

4. Tahap Tindak Lanjut Rekomendasi

Instansi pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan perbaikan sistem, proses kerja, atau kebijakan.



PERAN AUDIT KINERJA DALAM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH

Audit kinerja memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan audit kinerja, pemerintah dapat menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat publik yang optimal.

1. Audit kinerja memperkuat akuntabilitas publik
2. Audit kinerja mendorong transparansi pemerintah
3. Audit kinerja berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah



TANTANGAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA DI SEKTOR PUBLIK

1

Kualitas data yang belum optimal

2

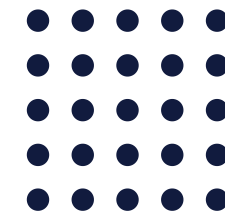
Rendahnya pemahaman aparaturnya pemerintah

3

Kompleksitas birokrasi dan banyaknya pemangku kepentingan

4

Pengaruh politik dan kepentingan tertentu



STUDI KASUS

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit besar, termasuk RSUD dr. Soetomo Surabaya. Rumah sakit ini menjadi rujukan utama bagi pasien dari berbagai daerah di Jawa Timur, sehingga peningkatan kapasitas alat kesehatan dianggap sangat mendesak. Dalam perencanaan awal, rumah sakit membutuhkan alat kesehatan canggih seperti CT-Scan 128 slice, ventilator ICU, serta perangkat anestesi ruang operasi. Perangkat tersebut diharapkan meningkatkan kecepatan diagnosis, memperluas kapasitas perawatan intensif, dan mengurangi antrean pasien yang selama ini semakin membludak. Namun, setelah alat-alat kesehatan tersebut datang dan diserahkan ke pihak rumah sakit, muncul permasalahan yang tidak diprediksi sebelumnya. Sebagian alat ternyata tidak dapat digunakan, CT-Scan 128 slice dibiarkan terbungkus dalam plastik tebal di sebuah ruangan penyimpanan, ventilator ICU menumpuk di sudut gudang, bahkan mesin anestesi yang baru dibeli belum dapat dipasang karena ruangan operasi yang seharusnya menampung alat itu belum selesai direnovasi. Ketika wartawan dan masyarakat mempertanyakan kondisi tersebut, pihak rumah sakit memberikan berbagai alasan. Mulai dari pengerjaan instalasi listrik yang tertunda, renovasi gedung yang tidak selesai tepat waktu, hingga kurangnya teknisi yang mampu mengoperasikan alat canggih itu. Padahal, dana pengadaan alat sudah digunakan sepenuhnya bahkan seluruh pembayaran telah dilakukan sesuai kontrak pengadaan. Laporan masyarakat ini sampai ke telinga BPK RI. Melihat potensi kerugian negara dan pemborosan anggaran, BPK melakukan audit kinerja untuk menilai apakah program pengadaan alat kesehatan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil audit menunjukkan adanya ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang cukup signifikan. Pengadaan alat tidak mempertimbangkan kesiapan ruangan, instalasi listrik, dan kemampuan SDM. Perencanaan gedung dan pengadaan berjalan secara terpisah sehingga tidak saling mendukung. Bahkan, harga beberapa alat terbukti lebih tinggi dari standar pasar, sehingga anggaran tidak digunakan secara ekonomis. Akibat kondisi tersebut, masyarakat tidak merasakan peningkatan pelayanan yang dijanjikan. Antrean CT-Scan tetap panjang, kapasitas ICU tidak bertambah, dan pasien operasi masih harus menunggu lama. Alat-alat kesehatan yang seharusnya menyelamatkan banyak nyawa, justru terbengkalai karena manajemen program yang tidak terencana dengan baik. Meski pada akhirnya sebagian alat mulai dioperasikan setelah tindak lanjut rekomendasi BPK, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa program pemerintah tidak hanya harus berjalan sesuai aturan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Audit kinerja pun terbukti berperan besar dalam mengungkap kelemahan manajemen dan mendorong perbaikan yang lebih baik ke depan.

PERTANYAAN?

1. Apa saja kesalahan perencanaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan pemerintah daerah dalam studi kasus tersebut?

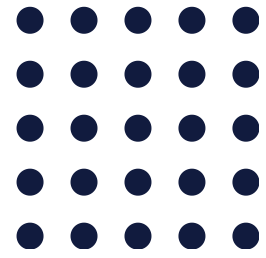
2. Mengapa pengadaan alat kesehatan dalam kasus ini tidak memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E)?

3. Bagaimana audit kinerja membantu mengungkap kelemahan dalam pelaksanaan program pengadaan alat kesehatan?

4. Jika Anda menjadi auditor, rekomendasi apa yang akan Anda berikan untuk mencegah kasus serupa terjadi?

SESI TANYA

 **JAWAB** 



TERIMA KASIH

Akuntansi Sektor Publik

